

ANALISIS KINERJA ADMINISTRASI PENDIDIKAN PASCA- KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR: STUDI KASUS SEKOLAH SDIT SAMBA TARUMA BEKASI

Ajat Sudrajat¹

¹Universitas Islam Nusantara (UNINUS)

ajatsudrajat1205@gmail.com

Abstract

The Merdeka Belajar policy implemented by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology encourages the transformation of educational governance, including that of elementary school administration. This change demands a more flexible, transparent, and technology-based administrative system. This study aims to analyze the performance of educational administration following the implementation of the Merdeka Belajar policy at SDIT SAMBA TARUMA, Bekasi. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving the principal, administrative staff, and teachers. The analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Merdeka Belajar policy provides opportunities to improve administrative performance, particularly in program planning, reporting effectiveness, and the use of digital technology. However, challenges such as limited human resources, lack of training, and adaptation to digital systems remain significant obstacles. These findings offer practical implications for integrated Islamic elementary schools in enhancing the quality of administrative management that is responsive to national education policies.

Keywords: SDIT Independent Learning Educational Administration, School Performance Bekasi.

Abstrak

Kebijakan *Merdeka Belajar* yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong transformasi tata kelola pendidikan, termasuk pada administrasi sekolah dasar. Perubahan ini menuntut adanya sistem administrasi yang lebih fleksibel, transparan, dan berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja administrasi pendidikan pasca-implementasi kebijakan *Merdeka Belajar* di SDIT SAMBA TARUMA, Bekasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan kepala sekolah, tenaga administrasi, serta guru. Analisis dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Merdeka Belajar* memberikan peluang peningkatan kinerja administrasi, terutama dalam aspek perencanaan program, efektivitas pelaporan, dan pemanfaatan teknologi digital. Meski demikian, hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta adaptasi terhadap sistem digital masih menjadi tantangan utama. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi sekolah dasar Islam terpadu dalam meningkatkan kualitas manajemen administrasi yang responsif terhadap kebijakan pendidikan nasional.

Kata Kunci: SDIT Merdeka Belajar Educational Administration, School Performance Bekasi.

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Kebijakan *Merdeka Belajar* yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2019 merupakan salah satu langkah reformasi pendidikan nasional yang paling besar dalam satu dekade terakhir. Program ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari birokrasi sekolah yang terlalu administratif, keterbatasan ruang inovasi bagi guru, hingga rendahnya relevansi pembelajaran dengan kebutuhan abad ke-21. *Merdeka Belajar* menekankan pada prinsip otonomi, fleksibilitas, dan akuntabilitas, sehingga sekolah diharapkan mampu mengelola manajemen pendidikan secara lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta tuntutan Masyarakat.

Dalam konteks sekolah dasar, administrasi pendidikan memegang peranan strategis sebagai fondasi penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Administrasi yang tertata dengan baik memungkinkan sekolah menjalankan fungsi manajemen mulai dari perencanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana-prasarana, hingga mekanisme evaluasi yang akuntabel. Namun, penerapan *Merdeka Belajar* membawa konsekuensi bahwa sekolah dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga mampu mengembangkan sistem manajemen yang adaptif, transparan, dan inovatif. Bagi sekolah dasar Islam terpadu, seperti SDIT SAMBA TARUMA di Bekasi, tantangan ini semakin kompleks karena harus mengintegrasikan kebijakan nasional dengan visi keislaman dan karakteristik lokal sekolah.

Urgensi analisis terhadap kinerja administrasi pendidikan di tingkat sekolah dasar terletak pada fungsinya sebagai penghubung antara kebijakan makro pemerintah dengan praktik mikro di ruang kelas. Tanpa administrasi yang efektif, kebijakan sebesar *Merdeka Belajar* berisiko tidak terimplementasi secara utuh, bahkan berpotensi menambah beban birokrasi baru bagi guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana administrasi sekolah dapat mengakomodasi semangat otonomi yang dicanangkan dalam *Merdeka Belajar*, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta peluang pengembangan tata kelola sekolah yang lebih berdaya saing.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja administrasi pendidikan di SDIT SAMBA TARUMA Bekasi pasca penerapan kebijakan *Merdeka Belajar*?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan administrasi pendidikan di SDIT SAMBA TARUMA setelah adanya kebijakan *Merdeka Belajar*?
3. Bagaimana strategi sekolah dalam mengoptimalkan administrasi pendidikan agar sejalan dengan prinsip otonomi, fleksibilitas, dan akuntabilitas yang ditekankan dalam *Merdeka Belajar*?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan kinerja administrasi pendidikan di SDIT SAMBA TARUMA Bekasi pasca penerapan kebijakan *Merdeka Belajar*.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat administrasi pendidikan setelah implementasi kebijakan tersebut.
3. Menganalisis strategi yang dilakukan sekolah dalam mengoptimalkan tata kelola administrasi agar relevan dengan semangat *Merdeka Belajar*.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan *Merdeka Belajar* di tingkat sekolah dasar. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara kebijakan pendidikan nasional dengan kinerja administrasi sekolah. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi akademisi untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan administrasi yang adaptif terhadap perubahan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah (SDIT SAMBA TARUMA Bekasi)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi internal dalam memperkuat sistem administrasi pendidikan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi perbaikan yang sesuai dengan prinsip otonomi dan fleksibilitas.

b. Bagi Guru dan Tenaga Administrasi

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pengelolaan administrasi yang efektif, sehingga guru dan staf administrasi memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menyesuaikan tugas-tugas mereka dengan tuntutan kebijakan *Merdeka Belajar*.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan *Merdeka Belajar* serta mempertimbangkan kebutuhan riil sekolah dalam penyusunan kebijakan lanjutan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan pada hakikatnya merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Barnawi dan Arifin (2017), administrasi pendidikan adalah upaya sistematis dalam mengelola komponen pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Definisi ini sejalan dengan pendapat Purwanto (2020) yang menekankan bahwa administrasi pendidikan bukan sekadar aktivitas birokratis, melainkan instrumen strategis dalam mendukung mutu layanan pendidikan.

Secara umum, konsep administrasi pendidikan mencakup empat fungsi pokok manajemen: (1) perencanaan (planning), (2) pengorganisasian (organizing), (3) pelaksanaan (actuating), dan (4) pengawasan (controlling). Fungsi ini tidak hanya berlaku pada skala makro di tingkat kementerian, tetapi juga menjadi pedoman pada level mikro di sekolah dasar. Administrasi pendidikan di sekolah dasar, misalnya, terlihat dalam penyusunan kurikulum, manajemen kelas, pengelolaan tenaga kependidikan, administrasi kesiswaan, hingga pengelolaan sarana dan prasarana.

Dalam konteks kebijakan pendidikan modern, administrasi pendidikan dipandang sebagai tulang punggung manajemen sekolah. Tanpa administrasi yang efektif, proses pembelajaran tidak dapat berjalan optimal karena tidak didukung sistem dokumentasi, perencanaan, dan pelaporan yang baik. Di era kebijakan *Merdeka Belajar*, administrasi pendidikan juga dituntut untuk lebih adaptif terhadap teknologi digital, seperti penerapan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIMS), penggunaan aplikasi daring untuk pelaporan,

serta digitalisasi dokumen akademik dan non-akademik.

Kebijakan Merdeka Belajar (Landasan Teoretis dan Regulasi)

Kebijakan *Merdeka Belajar* merupakan salah satu tonggak utama reformasi pendidikan di Indonesia yang mulai digagas pada akhir tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara teoretis, konsep ini berpijak pada paradigma pendidikan progresif yang menekankan otonomi sekolah, kemandirian guru, dan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan potensi secara optimal. Prinsip ini sejalan dengan teori manajemen pendidikan modern yang menempatkan sekolah sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*) yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Kebijakan *Merdeka Belajar* juga berakar pada teori desentralisasi pendidikan, di mana pengambilan keputusan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan memberi ruang bagi satuan pendidikan untuk berinovasi sesuai kebutuhan lokal. Dalam perspektif administrasi pendidikan, hal ini menggeser pola manajemen sekolah dari yang bersifat hierarkis-birokratis menjadi lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan riil sekolah.

Dari sisi regulasi, kebijakan ini dituangkan dalam berbagai peraturan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menekankan fleksibilitas kurikulum dan penguatan kompetensi.
2. Permendikbud No. 28 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, yang mempertegas reposisi kelembagaan dalam mendukung implementasi *Merdeka Belajar*.
3. Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang memberikan keleluasaan sekolah dalam menyusun kurikulum operasional.
4. Kebijakan Merdeka Belajar Episode 1–25 yang diluncurkan secara bertahap, mencakup aspek Ujian Nasional, RPP, Asesmen Nasional, hingga penguatan kurikulum merdeka.

Bagi sekolah dasar, termasuk sekolah dasar Islam terpadu, kebijakan ini memiliki implikasi langsung pada aspek administrasi. Misalnya, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lebih sederhana, pelaporan berbasis digital melalui platform resmi Kemendikbudristek, serta evaluasi berbasis *Asesmen Nasional*. Regulasi-regulasi tersebut menuntut adanya administrasi yang tidak hanya sekadar menjalankan fungsi dokumentasi, tetapi juga mampu mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Penelitian Terdahulu

Studi mengenai kinerja administrasi pendidikan dan implementasi kebijakan pendidikan telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi pijakan penting dalam memahami konteks penelitian ini, sekaligus menunjukkan adanya celah kajian yang belum banyak diungkap.

Penelitian Nasional

Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan *Merdeka Belajar* memberikan dampak signifikan pada tata kelola sekolah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati menegaskan bahwa penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdampak positif terhadap efisiensi kerja guru, namun dalam praktiknya administrasi sekolah tetap menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi digital. Penelitian lain oleh Setiawan dan Nugroho menemukan bahwa implementasi *Merdeka Belajar* di sekolah dasar membutuhkan dukungan administrasi yang kuat, terutama dalam aspek pelaporan berbasis data dan manajemen informasi sekolah.

Selain itu, riset oleh Hidayat pada sekolah Islam terpadu menunjukkan bahwa administrasi pendidikan memiliki peran penting dalam mengintegrasikan kebijakan nasional dengan visi kelembagaan berbasis nilai keagamaan. Hasil penelitian ini menekankan perlunya evaluasi kinerja administrasi untuk memastikan kebijakan *Merdeka Belajar* tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar mendukung mutu pendidikan.

Penelitian Internasional

Dalam lingkup internasional, isu administrasi pendidikan pasca kebijakan reformasi juga banyak dikaji. Studi oleh Fullan di Kanada menekankan bahwa desentralisasi pendidikan hanya dapat berhasil bila didukung oleh sistem administrasi yang profesional dan transparan. Sementara itu, penelitian Sahlberg (2021) di Finlandia menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis otonomi sekolah berhasil meningkatkan kualitas manajemen, asalkan disertai budaya kolaborasi dan tanggung jawab bersama.

Di kawasan Asia, riset oleh Lee & Hallinger di Singapura menyoroti peran penting *school-based management* dalam mendukung kebijakan pendidikan nasional. Mereka menemukan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas administrasi sekolah dalam mengelola sumber daya, menyusun laporan berbasis data, serta memfasilitasi inovasi kurikulum.

Gap Penelitian & Kerangka Pemikiran**Gap Penelitian**

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak studi mengenai implementasi kebijakan *Merdeka Belajar*, sebagian besar masih berfokus pada aspek kurikulum, pedagogi, atau kesiapan guru dalam mengajar. Kajian yang secara khusus menyoroti kinerja administrasi pendidikan di sekolah dasar Islam terpadu masih sangat terbatas. Padahal, administrasi merupakan komponen penting yang menjembatani antara kebijakan nasional dan praktik operasional sekolah.

Selain itu, penelitian-penelitian internasional lebih banyak membahas konsep *school-based management* dan desentralisasi pendidikan secara umum, tetapi belum banyak yang mengaitkan secara langsung dengan konteks khas Indonesia yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan religius tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menutup gap tersebut dengan menempatkan administrasi pendidikan sebagai fokus utama evaluasi pasca kebijakan *Merdeka Belajar*, khususnya pada sekolah dasar Islam terpadu (SDIT) di Bekasi.

Kerangka Pemikiran (Naratif)

Penelitian ini didasari oleh pemikiran bahwa keberhasilan implementasi kebijakan *Merdeka Belajar* tidak hanya ditentukan oleh kualitas guru dan kurikulum, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas administrasi pendidikan di sekolah. Administrasi yang efektif akan mendukung:

1. Perencanaan program sekolah yang adaptif terhadap kebijakan baru.
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi yang efisien dan akuntabel.
3. Pengawasan dan evaluasi berbasis data digital.

Namun, administrasi sekolah juga menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknologi, serta integrasi antara kebijakan nasional dengan visi sekolah Islam terpadu. Dari kerangka pemikiran ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan *Merdeka Belajar* berdampak pada kinerja administrasi sekolah, faktor pendukung dan penghambatnya, serta strategi optimalisasi yang dapat dilakukan.

C. METODE PENELITIAN**Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pemilihan

desain ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk memahami secara mendalam kinerja administrasi pendidikan pasca penerapan kebijakan *Merdeka Belajar* di SDIT SAMBA TARUMA, Bekasi.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis melalui angka-angka statistik, melainkan untuk menggali fenomena yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif. Seperti dikemukakan oleh Creswell, pendekatan kualitatif relevan digunakan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, makna, serta perspektif partisipan dalam suatu konteks sosial tertentu.

Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi intensif terhadap satu unit analisis, yakni administrasi pendidikan di SDIT SAMBA TARUMA. Studi kasus juga sesuai digunakan dalam penelitian kebijakan pendidikan, terutama untuk menelusuri implementasi kebijakan nasional di level sekolah. Yin menyatakan bahwa studi kasus efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat “bagaimana” dan “mengapa”, sehingga tepat untuk menganalisis bagaimana kinerja administrasi sekolah terbentuk dan mengapa terdapat faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasinya.

Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) SAMBA TARUMA, yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar Islam terpadu yang telah mengimplementasikan kebijakan *Merdeka Belajar*. Selain itu, SDIT SAMBA TARUMA memiliki karakteristik manajemen sekolah yang cukup kompleks, mencakup aspek kurikulum, administrasi, dan pengelolaan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sekolah ini dipandang representatif untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan nasional diterjemahkan ke dalam praktik administrasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian melibatkan para pemangku kepentingan utama yang berperan langsung dalam administrasi pendidikan di sekolah, yaitu:

- a. Kepala Sekolah – sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pendidikan.

- b. Tenaga Administrasi – staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan dokumen, data, pelaporan, serta sistem administrasi berbasis teknologi.
- c. Guru – sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem administrasi pembelajaran, termasuk penyusunan RPP, pelaporan hasil belajar, dan pelaksanaan asesmen.
- d. Komite Sekolah/Orang Tua – sebagai mitra sekolah dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap efektivitas administrasi pendidikan.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan *Merdeka Belajar* di lingkungan sekolah. Dengan melibatkan berbagai pihak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja administrasi pendidikan dari sudut pandang manajerial, teknis, maupun praktis.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan terdiri atas:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara disusun dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka yang berfungsi untuk menggali informasi mendalam dari kepala sekolah, tenaga administrasi, dan guru. Pertanyaan difokuskan pada:

- a. Pemahaman responden tentang implementasi kebijakan *Merdeka Belajar*.
- b. Pengalaman dalam melaksanakan administrasi pendidikan pasca kebijakan tersebut.
- c. Hambatan dan peluang yang ditemui dalam proses administrasi.
- d. Strategi sekolah dalam meningkatkan efektivitas administrasi.

Pedoman wawancara bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti tetap fleksibel dalam menyesuaikan pertanyaan sesuai konteks jawaban responden.

2. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mencatat secara sistematis kegiatan administrasi di sekolah. Aspek yang diamati meliputi:

- a. Proses perencanaan dan penyusunan dokumen administrasi.
- b. Penggunaan teknologi dalam pelaporan dan manajemen data.

- c. Koordinasi antar tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas administratif.
- d. Pola interaksi antara guru, staf administrasi, dan kepala sekolah terkait administrasi pendidikan.

Instrumen ini membantu peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai praktik administrasi, sekaligus membandingkan dengan data hasil wawancara.

3. Angket

Selain wawancara dan observasi, angket disiapkan untuk melengkapi data kuantitatif sederhana terkait persepsi guru dan tenaga administrasi terhadap efektivitas administrasi pendidikan. Angket ini menggunakan skala Likert (1–5) dengan indikator:

- a. Kejelasan prosedur administrasi.
- b. Kemudahan penggunaan sistem administrasi berbasis digital.
- c. Efisiensi waktu dan tenaga dalam pelaksanaan administrasi.
- d. Tingkat dukungan kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja administrasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara **kualitatif**, menyesuaikan dengan desain studi kasus yang digunakan. Menurut Miles, Huberman, & Saldaña, analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, diseleksi, dan disederhanakan sesuai fokus penelitian. Proses reduksi mencakup pengkodean awal, pengelompokan tema, serta penyingkiran data yang tidak relevan. Tujuannya adalah untuk memfokuskan data pada aspek kinerja administrasi pendidikan pasca kebijakan *Merdeka Belajar*.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk matriks, tabel ringkas, narasi tematik, atau kutipan pernyataan informan. Penyajian ini bertujuan agar peneliti dapat memahami pola, hubungan, maupun kecenderungan yang muncul. Misalnya, membandingkan pengalaman kepala sekolah dengan guru terkait penggunaan sistem administrasi digital.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Kesimpulan ini tidak bersifat final sejak awal, melainkan terus diverifikasi sepanjang

penelitian dengan melakukan pengecekan silang (*triangulasi*) antara data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

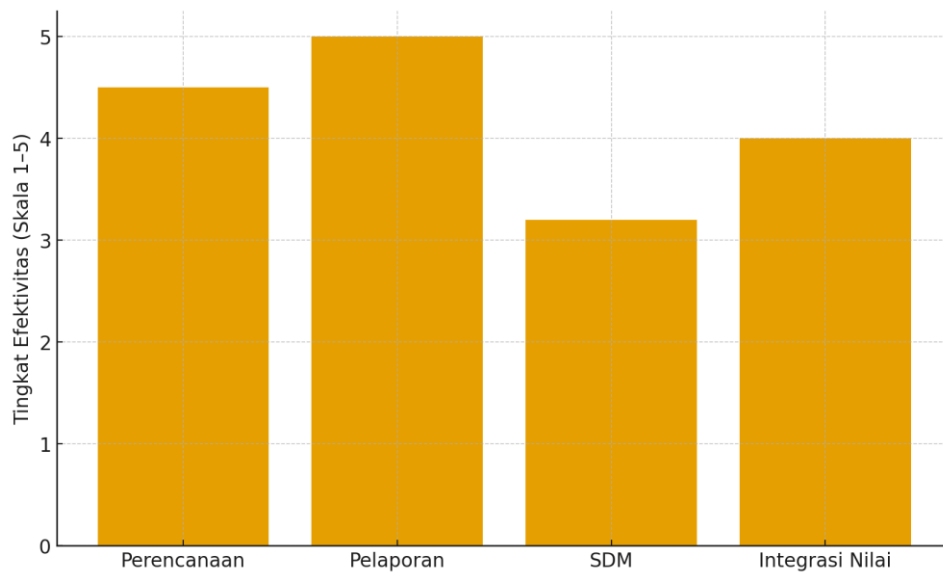
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Ringkasan Temuan Administrasi Pendidikan Pasca Merdeka Belajar

Aspek Administrasi	Temuan Utama	Makna dan Implikasi
Perencanaan Program	Penyusunan dokumen lebih fleksibel, RPP dipermudah, dan perencanaan lebih adaptif.	Guru memiliki ruang inovasi lebih besar. Administrasi tidak lagi menjadi hambatan teknis.
Pelaporan Digital	Sekolah mulai mengandalkan aplikasi berbasis daring untuk manajemen data dan laporan.	Akurasi data meningkat dan proses pelaporan lebih cepat serta dapat ditelusuri.
Sumber Daya Manusia	Staf administrasi masih kesulitan mengoperasikan sistem digital secara optimal.	Membutuhkan pelatihan berkelanjutan agar transisi menuju administrasi digital berjalan baik.
Integrasi Nilai Keislaman	Administrasi sekolah menyesuaikan kebijakan nasional dengan visi Islam terpadu.	Menciptakan keseimbangan antara regulasi pemerintah dan identitas lembaga.

Tabel di atas merangkum bagaimana berbagai aspek administrasi pendidikan di SDIT SAMBA TARUMA mengalami perubahan setelah implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Perencanaan program menjadi lebih efisien karena penyederhanaan dokumen seperti RPP, sehingga guru dapat memfokuskan waktu pada proses pembelajaran. Pada sisi pelaporan, digitalisasi membuat proses pendataan lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya merata karena keterbatasan SDM dalam hal literasi digital masih menjadi hambatan. Sementara itu, sebagai sekolah Islam terpadu, administrasi tetap menjaga identitas lembaga agar selaras dengan nilai

keislaman, sekaligus tetap mematuhi arah kebijakan nasional.



Gambar 1. Visualisasi Efektivitas Administrasi Pasca Merdeka Belajar

Grafik di atas menggambarkan persepsi efektivitas administrasi pendidikan setelah kebijakan Merdeka Belajar diterapkan. Pelaporan digital mendapat skor tertinggi karena sekolah telah berhasil memanfaatkan aplikasi daring untuk mempercepat alur dokumentasi.

Perencanaan program berada pada posisi kedua, mencerminkan bahwa kebijakan penyederhanaan dokumen benar-benar membantu meringankan beban administratif guru. Sementara itu, skor terendah ada pada aspek SDM. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan staf dalam mengoperasikan perangkat digital masih perlu ditingkatkan. Pada aspek integrasi nilai keislaman, efektivitasnya relatif baik karena sekolah sudah memiliki system manajemen berbasis nilai yang kuat, tetapi tetap perlu penyesuaian agar selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar yang menuntut fleksibilitas dan adaptasi yang lebih cepat.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan, tetapi juga memperlihatkan area yang membutuhkan intervensi strategis agar administrasi sekolah dapat berjalan optimal di era pendidikan modern.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan Merdeka Belajar memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas administrasi pendidikan di SDIT SAMBA TARUMA. Perencanaan program menjadi lebih sederhana, pelaporan digital meningkat efisiensinya, dan integrasi nilai lembaga tetap terjaga.

Namun, kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem digital masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital menjadi prioritas agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

- 1) Sekolah perlu menyusun program pelatihan digital yang terencana dan berkelanjutan bagi seluruh tenaga administrasi dan guru.
- 2) Pemerintah diharapkan menyediakan platform digital yang lebih stabil serta mudah dioperasikan bagi satuan pendidikan.
- 3) Sekolah perlu memperkuat SOP administrasi berbasis digital agar seluruh unit kerja memiliki standar kerja yang sama. Kolaborasi antara guru dan staf administrasi perlu
- 4) ditingkatkan, terutama pada fase verifikasi dan penyelarasan data laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- F. F. Syafi'i, "Merdeka belajar: sekolah penggerak," *Pros. Semin. Nas. Pendidik. DASAR "Merdeka Belajar dalam Menyambut Era Masy. 5.0,"* no. November, pp. 46–47, 2021.
- I. Hasbi et al., *Administrasi Pendidikan Tinjauan Konsep dan Praktik*. 2021.
- M. F. Noorrahman, M. Rizal, and M. Sairin, "Peran Administrasi Publik Dalam Meningkatkan Kinerja Dalam Aspek Kepuasan Kerja Pada Pejabat Struktural Akademik Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai," *SENTRI J. Ris. Ilm.*, vol. 1, no. 1, pp. 155–163, 2022.
- A. Purwanto, "Pengembangan Kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) di Sekolah Dasar Islam Terpadu," *J. BASICEDU*, vol. 6, no. 1, pp. 335–342, 2022.
- D. Destriani and I. Warsah, "Pemanfaatan Model Pembelajaran Flipped Classroom Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar Islam Terpadu," *SITTAH J. Prim. Educ.*, vol. 3, no. 2, pp. 175–190, 2022.
- Yustia Rachma Fitriani and Sri Minarti, "Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam," *Salimiya J. Stud. Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 577–583, 2025.
- E. Siswanto et al., *Manajemen Pendidikan*. Kuningan: CV. Aina Media Baswara, 2024.